

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DAN
LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM
PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

ANUR ASWIDAH

NIM. 210802041

**Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Program Studi Ilmu Administrasi Negara**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1446 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anur Aswidah
NIM : 210802041
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
Tempat Tanggal Lahir : Mns. Gantung, 15 Mei 2003
Alamat : Mns. Gantung, Kec. Kaway XVI, Kab. Aceh Barat

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.

Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini. Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwasannya saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap dikenai sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 21 Juli 2025




Anur Aswidah

NIM. 210802041

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING

**KERJASAMA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DAN LEMBAGA
SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI
PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry
Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S-1)
Pada Program Ilmu Administrasi Negara

Oleh :

ANUR ASWIDAH

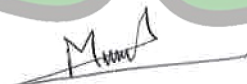
NIM. 210802041

Mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Pemerintahan

Disetujui untuk dimunaqasyahkan oleh :

Pembimbing

A R - R A N I R Y



Muazzinah, M.P.A

NIP. 198411252019032012

LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH

KERJASAMA PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH DAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN

SKRIPSI

ANUR ASWIDAH
NIM. 210802041

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Ilmu Soisal Dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana (S1) Dalam Ilmu Administrasi Negara

Pada Hari/Tanggal: Kamis, 21 Agustus 2025
Banda Aceh,
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Muazzinah, M.P.A

NIP. 198411252019032012

Sekretaris,

Shafiyul Rahman, S.A.P

Penguji I,

Eka Januar, M. Soc. Sc

NIP. 198401012015031003

Penguji II,

Zakki Fuad Khalil, M.Si.

NIP. 199011192022031001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Muji Mulia, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197403271999031005

ABSTRAK

Dinamika kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam upaya penguatan kapasitas perempuan berbasis ekonomi. Pemberdayaan perempuan menjadi salah satu aspek penting dalam pembangunan ekonomi lokal, terutama dalam konteks penguatan peran perempuan dalam sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan keterlibatan antar pemangku kepentingan yang berorientasi pada peningkatan ekonomi perempuan. Penelitian ini bertujuan mengetahui upaya pemerintah dan LSM untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan penguatan kapasitas perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama antara pemerintah dan LSM cenderung saling melengkapi. Pemerintah berperan penyediaan regulasi dan dukungan program berupa pelatihan dan modal usaha, sementara LSM berkontribusi melalui pendampingan langsung dan menjembatani kebutuhan perempuan akar rumput dengan struktur kebijakan formal. Penelitian ini adanya kendala pada pelaksanaan program belum tepat sasaran, keterbatasan anggaran, serta minimnya evaluasi dan monitoring. Maka, perlu formulasi kebijakan yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang dapat memastikan efektivitas pelaksanaan program penguatan ekonomi perempuan di tingkat lokal.

Kata Kunci: *Bentuk Kerjasama, Pemerintah, LSM, Pemberdayaan Perempuan, Ekonomi Lokal.*



KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kerjasama Pemerintah Kota Banda Aceh dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan” dengan baik dan waktu yang tepat. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi seluruh umat manusia.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh nilai mata kuliah skripsi. Selama melakukan penyusunan skripsi peneliti banyak menerima atas segala arahan, bimbingan serta dukungan dan motivasi yang telah diberikan. Peneliti hanya mampu memanjatkan doa semoga usaha dan bantuan mereka mendapatkan balasan kebaikan di sisi-Nya, baik dalam bentuk moral maupun material. Maka dari itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Muji Mulia, M.Ag. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muazzinah, B.Sc., MPA. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sebagai dosen Pembimbing skripsi yang memberikan masukan luar biasa dan tempat berdiskusi dengan penuh kesabaran, semoga Allah SWT membalas setiap kebaikan, ilmu, dan keikhlasan beliau dengan pahala yang berlipat ganda, kesehatan, serta keberkahan dalam setiap langkah kehidupannya.
4. Dr. Delfi Suganda, S.HI., LL.M., Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan UIN Ar-Raniry.

5. Muhammad Thalal, Lc., M.Si., M.Ed. Penasehat Akademik yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi penelitian ini.
6. Segenap seluruh dosen di lingkungan Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.
7. Terima kasih kepada informan yang bersedia diwawancarai serta memberikan informasi dan juga data yang mendukung sehingga terselesaikan skripsi penelitian ini.
8. Terima kasih kepada kedua orang tua saya, Ayahanda Hamidi Daud dan Ibunda Safriah. Terima kasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih sayang yang diberikan. Beliau telah membiayai pendidikan saya dari dulu sampai detik ini. Beliau mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
9. Untuk kakak saya tercinta Lilis Sariyanti, yang telah menjadi sumber semangat dan keceriaan di tengah penatnya perjuangan ini. Tawa polosmu, candamu yang sederhana dan perhatian kecilmu tak pernah gagal membuatku tersenyum, bahkan di saat paling sulit. Terima kasih telah menjadi bagian dari kekuatan yang mendorongku menyelesaikan perjalanan ini. Semoga kelak nanti kalian bisa meraih cita-cita dengan lebih hebat lagi.
10. Terakhir kepada diri sendiri yang telah bertahan hingga saat ini, di saat tidak percaya terhadap diri sendiri namun tetap mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil adalah bagian dari perjalanan. Terimakasih sudah memilih berusaha sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terimakasih tetap menjadi manusia yang selalu berusaha dan tidak lelah mencoba dan memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini telah menyelesaikannya sebaik dan semaksimal mungkin.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan dan belum sepenuhnya sempurna. Oleh

karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun sebagai bahan pembelajaran serta perbaikan di masa mendatang, agar karya ini dapat lebih bermanfaat dan memberikan nilai positif bagi para pembaca.

Banda Aceh 25 Juli 2025

Anur Aswidah
NIM. 210802041



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	ii
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PENGESAHAN SIDANG MUNAQSAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi masalah	7
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Masalah.....	8
1.5 Manfaat Masalah.....	8
 BAB II TINJAUAN PUSAKA.....	 10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Teori Kerjasama Pemerintahan dan LSM	10
2.1.2 Indikator Kerjasama Pemerintah dan LSM	12
2.1.3 Konsep Model Pendekatan Pentahelix	13
2.2 Penelitian Terdahulu	16
2.3 Kerangka Berpikir.....	21
 BAB III METODE PENELITIAN	 22
3.1 Pendekatan Penelitian	22
3.2 Fokus Penelitian.....	21

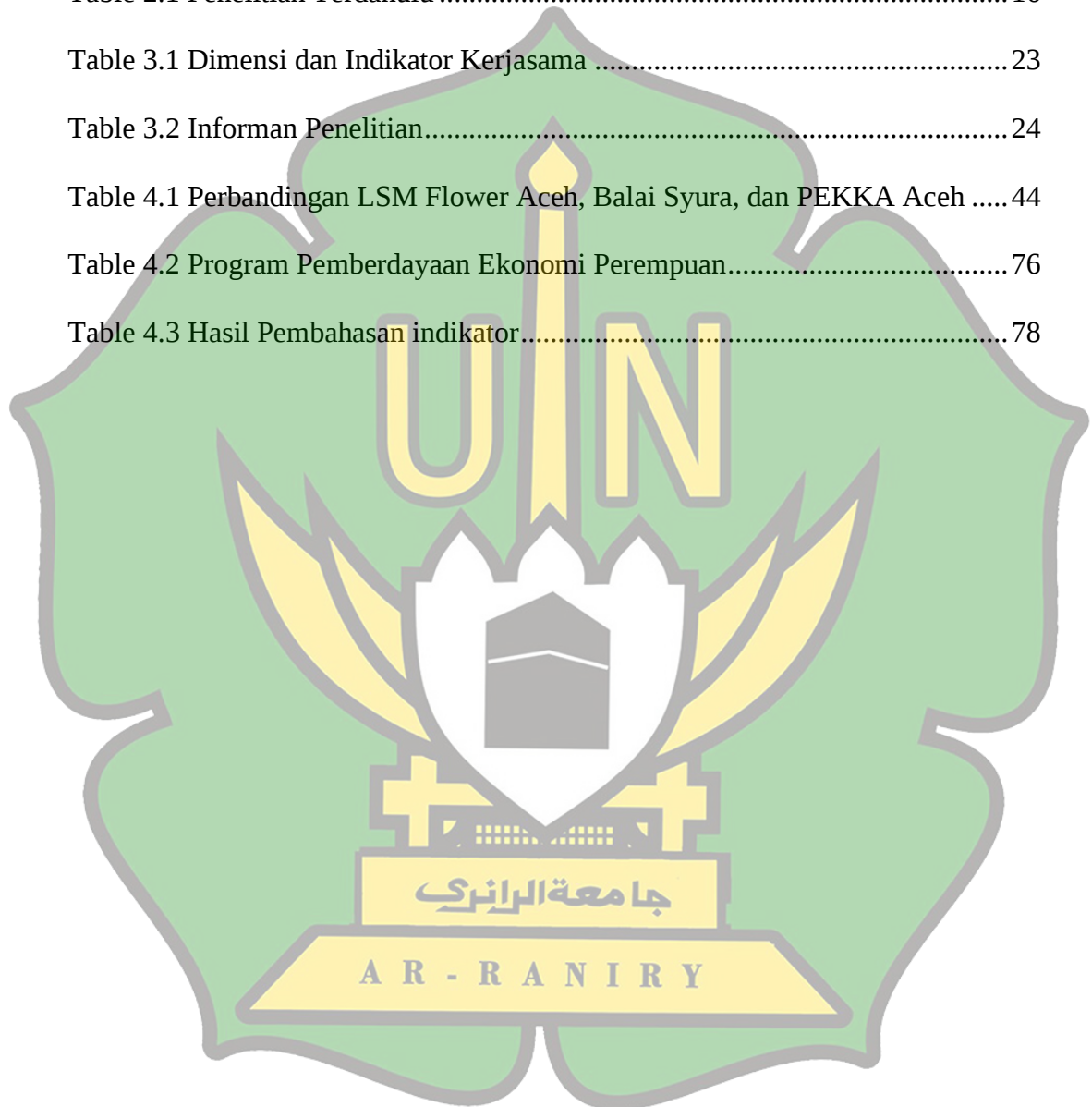
3.3 Lokasi Penelitian.....	23
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	23
3.5 Informan Penelitian.....	24
3.6 Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.7 Teknik Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	27
4.1 Profil Dinas dan LSM	46
4.2 Hasil Penelitian	47
4.3 Analisis Kerjasama Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Kota Banda Aceh	50
4.4 Hambatan Dalam Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	79
BAB V PENUTUP.....	88
5.1 Kesimpulan	88
5.2 Saran	89
DAFTAR PUSAKA.....	90
DAFTAR LAMPIRAN	92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	102

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

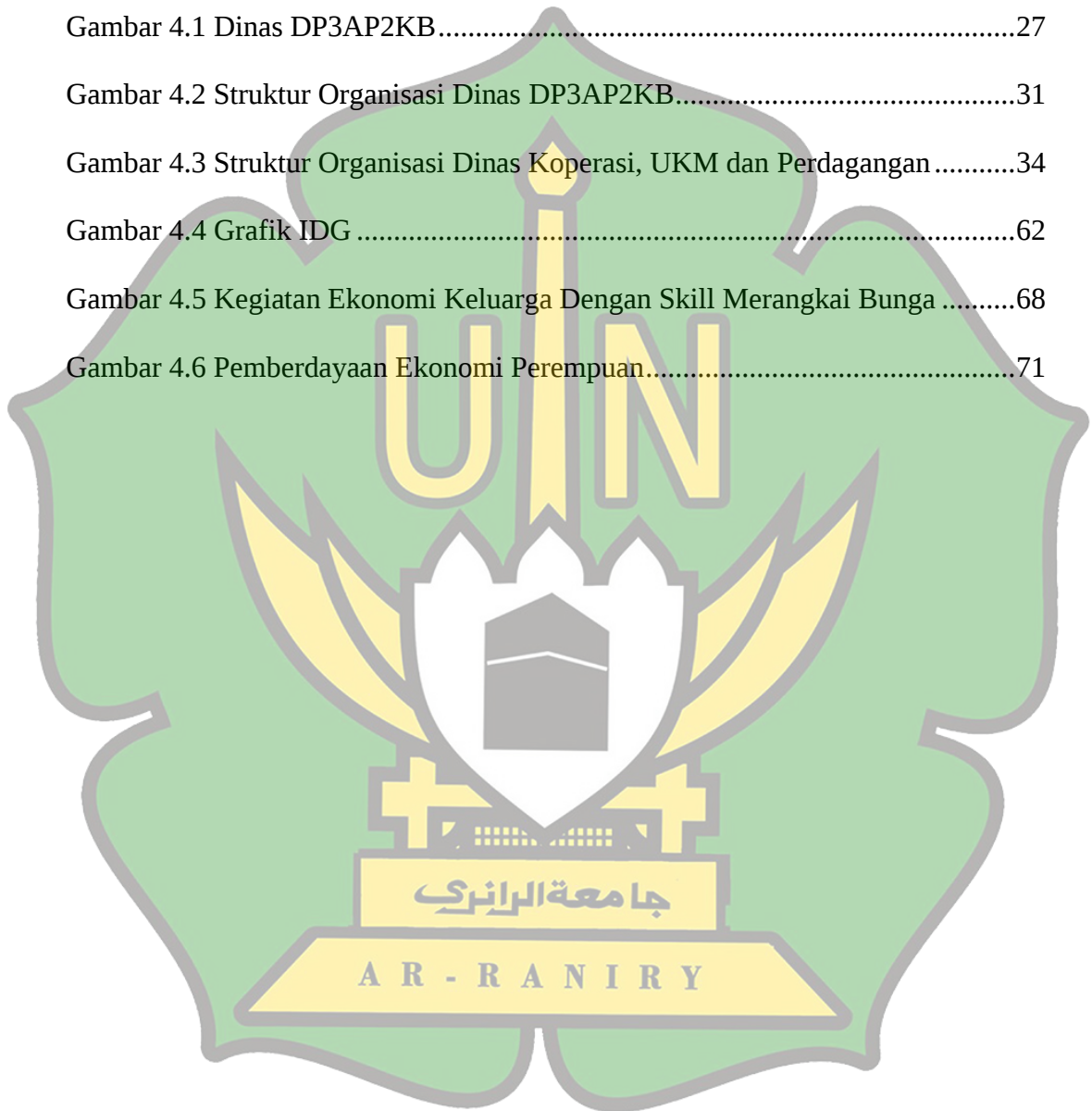
DAFTAR TABLE

Table 1.1 Indeks Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	4
Table 2.1 Penelitian Terdahulu	16
Table 3.1 Dimensi dan Indikator Kerjasama	23
Table 3.2 Informan Penelitian.....	24
Table 4.1 Perbandingan LSM Flower Aceh, Balai Syura, dan PEKKA Aceh	44
Table 4.2 Program Pemberdayaan Ekonomi Perempuan.....	76
Table 4.3 Hasil Pembahasan indikator.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	21
Gambar 4.1 Dinas DP3AP2KB	27
Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas DP3AP2KB	31
Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan	34
Gambar 4.4 Grafik IDG	62
Gambar 4.5 Kegiatan Ekonomi Keluarga Dengan Skill Merangkai Bunga	68
Gambar 4.6 Pemberdayaan Ekonomi Perempuan	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar pertanyaan wawancara

Lampiran 2 Surat Keputusan Dekan FISIP UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Lampiran 3 Surat Izin penelitian

Lampiran 4 Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5 Dokumentasi penelitian

Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan bagian penting dari pembangunan berkelanjutan. Di era desentralisasi, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mendorong kesetaraan gender dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program berbasis pemberdayaan. Salah satu pendekatan yang efektif adalah melalui kerjasama antara pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), sebagai mitra dalam implementasi kebijakan pembangunan. Kerjasama ini dibutuhkan untuk memperkuat sinergi, memperluas jangkauan program, serta meningkatkan efektivitas pemberdayaan masyarakat, terutama perempuan.¹

Pentingnya kerjasama pemerintah dalam pembangunan sosial dan ekonomi juga ditegaskan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa daerah memiliki kewenangan mengatur urusan pemerintahan termasuk urusan pemberdayaan masyarakat terutama perempuan. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Banda Aceh memiliki mandat untuk menjalankan berbagai program pemberdayaan ekonomi berbasis gender, yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian perempuan, khususnya kelompok rentan dan miskin.

¹ Qamara Tamami, Skripsi: “*Dakwah Solidaritas Sosial Di Kalangan Remaja Putri (Studi Pada Lembaga Swadaya Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga Aceh Jaya*”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2023), Hal. 49

Pemberdayaan ekonomi perempuan tidak hanya menyangkut aspek peningkatan pendapatan, tetapi juga mencakup penguatan kapasitas, literasi keuangan, dan pengakuan atas peran produktif perempuan dalam pembangunan daerah. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) juga menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pencapaian target pembangunan yang inklusif.²

Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang masih menghadapi tantangan besar dalam hal pengentasan kemiskinan. Meskipun angka kemiskinan menunjukkan tren penurunan dalam beberapa tahun terakhir, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Aceh tetap menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera. Pada September 2024, persentase penduduk miskin di Aceh mencapai 12,64%. Kondisi ini menandakan adanya ketimpangan pembangunan yang perlu ditanggulangi secara lebih strategis dan inklusif.

Namun dalam praktiknya, pemerintah tidak dapat berjalan sendiri. Keterlibatan LSM sebagai mitra strategis sangat diperlukan untuk menjangkau kelompok perempuan di tingkat akar rumput. LSM sering kali memiliki pendekatan partisipatif, jaringan lokal yang kuat, dan pemahaman konteks sosial yang mendalam. Di Kota Banda Aceh, kerjasama antara DP3AP2KB dan beberapa LSM telah berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha mikro, hingga akses terhadap modal usaha.

² Tarini Mahbengini, Skripsi: “Pola Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Flower Aceh Dalam Konstruksi Gender Pada Masyarakat Aceh”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2022), Hal. 54

Salah satu contoh nyata adalah kerjasama antara DP3AP2KB Kota Banda Aceh dengan Lemaga Swadaya Masyarakat terutama yang berfokus pada isu terhadap perempuan, Flower Aceh menjadi salah satu LSM di Kota Banda Aceh yang fokus pada penguatan hak-hak perempuan dan pembangunan berbasis komunitas. Flower Aceh menjadi aktif dalam memberikan pelatihan keterampilan, advokasi ekonomi berbasis gender, hingga mendampingi perempuan korban kekerasan yang ingin memulai usaha mandiri. Selain itu, terdapat juga LSM seperti PEKKA, Balai Syura, dan beberapa LSM lainnya yang turut berkontribusi dalam penguatan peran ekonomi perempuan melalui pendekatan komunitas.

Implementasi program pemberdayaan ekonomi perempuan menjadi langkah strategis dengan memanfaatkan dana desa untuk pendanaan usaha mikro perempuan. Salah satu contoh nyata adalah melalui program Credit Union untuk membantu ekonomi perempuan dengan mengelola tabungan simpan pinjam yang dikelola oleh sekelompok orang yang wajib menyetorkan sejumlah uang dan dapat dipinjam bagi yang membutuhkan modal usaha. Pelatihan kewirausahaan ini memberikan bimbingan teknis terhadap keterampilan dan strategi pemasaran produk untuk meningkatkan modal usaha mereka. Program Credit Union memberikan banyak manfaat untuk keberlangsungan hidup terutama bagi janda dan masyarakat pedesaan yang kurang mampu.³

³ Anum Fauziah, Skripsi: “Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Melalui Program Credit Union (CU) LSM Flower Aceh”, (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry, 2020), Hal. 56

Tabel 1.1
Indeks Pemberdayaan Ekonomi Perempuan

Tahun	IDG
2019	63.30
2020	63.59
2021	63.42
2022	62.89
2023	62.42
2024	62.24

Sumber: Badan Pusat Statistik Aceh

Berdasarkan Tabel 1.1 Indeks Pemberdayaan Ekonomi Perempuan dapat kita amati bahwa dalam jangka dua tahun sesudahnya telah mengalami pada periode 2019-2021 mengalami kenaikan meskipun tidak terlalu signifikan terhadap sumber daya ekonomi, kesetaraan, dan keterlibatan. Sedangkan pada periode 2022 berjumlah 62,89 menurun sedikit pada periode 2023 62, 42 akibat dampak covid-19. Lalu pada periode 2024 juga mengalami penurunan yang berpengaruh pada kesejahteraan ekonomi perempuan. Dalam hal ini menjadi tantangan besar dalam pemberdayaan ekonomi di daerah ini.

Data yang dihimpun dari DP3AP2KB Kota Banda Aceh menunjukkan bahwa pada tahun 2023, terdapat lebih dari 350 perempuan yang mengikuti pelatihan dan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan menjahit, tata boga, pengemasan produk, dan kewirausahaan digital. Sekitar 62% di antaranya berhasil mengembangkan usaha rumahan secara mandiri. Hal ini menunjukkan potensi besar dari program pemberdayaan yang dilakukan secara kolaboratif.

Masalah lainnya yang masih mengemuka adalah rendahnya partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan publik dan ekonomi. Budaya patriarki yang masih kuat di beberapa wilayah Aceh membuat perempuan sulit mendapatkan ruang yang setara dalam forum-forum strategis, baik di tingkat gampong (desa) maupun kabupaten/kota. Banyak program pembangunan masih bersifat top-down dan belum mengintegrasikan perspektif gender secara menyeluruh. Hal ini membuat kebutuhan dan potensi perempuan seringkali terabaikan. Perempuan masih dianggap sebagai pelengkap, bukan pelaku utama pembangunan ekonomi.

Sebagai solusi normatif, Pemerintah Aceh telah mengesahkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Bagi Perempuan menjelaskan bahwa perempuan memiliki hak atas perlindungan kesetaraan gender baik itu perempuan ataupun lelaki agar dapat berproses dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan nasional⁴. Dalam Pasal 7 Qanun ini disebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyediakan pelatihan keterampilan, dukungan modal, serta akses pemasaran bagi perempuan, khususnya mereka yang berada dalam kondisi rentan. Qanun ini juga mengamanatkan pentingnya pembentukan lembaga pendukung seperti Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang dapat menjadi garda depan dalam memberikan layanan pendampingan ekonomi dan psikososial.

⁴ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Pemberdayaan Perempuan

Contoh nyata implementasi Qanun ini dapat dilihat pada program pelatihan usaha rumahan yang digagas oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat. Program ini berhasil membentuk kelompok usaha perempuan berbasis gampong yang memproduksi makanan ringan, kerajinan tangan, dan produk herbal. Selain diberikan pelatihan teknis, peserta juga mendapatkan pendampingan untuk mengakses pasar digital melalui platform lokal. Beberapa kelompok usaha bahkan telah mengekspor produk ke luar Aceh dan meraih penghargaan UMKM perempuan tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama yang kuat antara pemerintah dan LSM dapat menjawab kebutuhan nyata perempuan.

Peran pemerintah dalam hal ini adalah sebagai fasilitator kebijakan, penyedia anggaran, dan regulator program. Sementara itu, LSM berperan sebagai pelaksana teknis di lapangan, pendamping masyarakat, serta penghubung antara program dan penerima manfaat. Implementasi program dilakukan melalui pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, pemberian bantuan modal usaha kecil, pembentukan kelompok usaha perempuan (KUP), serta penguatan koperasi perempuan berbasis syariah.⁵

Namun, terdapat sejumlah hambatan yang masih dihadapi, antara lain: rendahnya literasi keuangan perempuan, masih kuatnya budaya patriarki di beberapa wilayah, keterbatasan akses terhadap teknologi dan pasar, serta kurangnya

⁵ Ridwan Arif, Skripsi: “Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Blood For Life Foundation dalam Melayani Kebutuhan Pasien dari Luar Kota Banda Aceh (Studi Pelayanan Tempat Tinggal, Makan, Dan Transportasi, Selama Pengobatan di Kota Banda Aceh)”, (Banda Aceh:UIN Ar-Raniry, 2020), Hal. 55

kesinambungan pendampingan. Selain itu, tantangan dalam koordinasi antara pihak pemerintah dan LSM juga menjadi faktor yang perlu dievaluasi lebih lanjut.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan solusi strategis seperti: peningkatan kapasitas SDM perempuan, pelatihan kewirausahaan digital, peningkatan peran kader pemberdayaan perempuan, serta penguatan regulasi yang mendukung Kerjasama multisektor. Pemerintah juga perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan keberlanjutan program.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui secara lebih dalam bagaimana bentuk kerjasama antara Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) dengan LSM dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan model kerjasama yang efektif dan berkelanjutan untuk mendorong pembangunan ekonomi inklusif yang berbasis gender.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini berangkat dari fenomena perlunya sinergi antara instansi pemerintah dan lembaga non-pemerintah dalam mendorong pemberdayaan ekonomi perempuan adapun identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat perempuan di Kota Banda Aceh yang belum berdaya secara ekonomi dan membutuhkan dukungan dari berbagai pihak.

2. Kerja sama antara DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan ekonomi perempuan belum sepenuhnya diketahui bentuk kerjasama dan efektivitasnya.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan data yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kerjasama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam pemberdayaan ekonomi perempuan?
2. Apa saja peran yang dijalankan oleh DP3AP2KB Kota Banda Aceh dan LSM dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi perempuan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan bentuk kerjasama antara DP3AP2KB Kota Banda Aceh dengan Lembaga Swadaya Masyarakat dalam pemberdayaan ekonomi perempuan.
2. Menganalisis peran masing-masing pihak (DP3AP2KB dan LSM) dalam pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi perempuan.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting kepada masyarakat terhadap pengembangan teori pemberdayaan ekonomi perempuan.

Penelitian ini juga memperkuat teori-teori sebelumnya dengan pendekatan model pentahelix dalam kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh. Pemerintah Kota Banda Aceh (DP3AP2KB) adalah sebagai masukan dalam meningkatkan kualitas program pemberdayaan ekonomi perempuan berbasis kemitraan. Sedangkan, LSM adalah sebagai evaluasi dalam membangun strategi Kerjasama yang lebih efektif dalam mendampingi perempuan. Dan masyarakat adalah untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya peran aktif perempuan dalam pembangunan ekonomi lokal dan pentingnya sinergi antar pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini mengkaji model kerjasama antara pemerintah daerah dan LSM dalam isu-isu pemberdayaan.

2. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting kepada masyarakat terhadap pengembangan teori pemberdayaan ekonomi perempuan. Penelitian ini juga memperkuat teori-teori sebelumnya dengan menggunakan pendekatan model pentahelix dalam kerjasama antara Pemerintah dan Lembaga Swadaya Masyarakat Aceh. Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang administrasi publik, pembangunan gender, dan studi kebijakan terhadap kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sipil.